

ABSTRAK

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, calon kepala desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dalam jangka waktu 3 hari, dalam kampanye tersebut ada larangan yang tidak boleh dilakukan seperti yang disebut dalam Permendagri No 112 Tahun 2014 Pasal 30 huruf j” menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye”, meskipun secara jelas dilarang tapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih dilakukan bahkan sebelum masa kampanye, perbuatan tersebut secara jelas merupakan tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang pemilu Pasal 73 Ayat (3). Penulisan skripsi terkait persoalan tersebut adalah menggunakan metode penelitian *Sosio-Legal* yaitu dengan mengkaji aturan-aturan yang berlaku dan penerapannya berkaitan dengan *money politics* pada pemilihan kepala desa dengan menggunakan pendekatan *statutes approach*, dan pendekatan *case approach*. Adapun hasil dari penelitian ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa belum maksimalnya penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan dalam upaya menaggulangi *money politics* pada pemilihan kepala desa serta aturan yang masih kurang jelas terkait perbuatan *money politics* dan kurangnya peran serata masyarakat khususnya masyarakat desa dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan suap pada pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: Penanggulangan tindak pidana suap, pemilihan kepala desa, Studi *money politics*.

ABSTRACT

The village head is directly elected by the villagers of the direct election of the village head, public, free of confidence, honest and fair, candidates for village heads conducted campaigns in accordance with socio-cultural conditions of the community within a period of 3 days, there shall be no prohibition in the campaign as mentioned in the Permendagri no 112 of 2014 article 30 letter j " promising or giving money or other materials to campaign participants ", although it is clearly prohibited but in fact the act is still committed even before the Kampanye period, the act is clearly a criminal act as regulated in Law No. 3 of 1999 on the election of Article 73 Paragraph (3). Writing thesis related to the problem is using research method Socio-Legal is to examine the rules that apply and its application related to money politics in village head election by using statutes approach, case approach, and case approach. The results of this study in the effort of penanggulangan bribery crime in village head election shows that not yet maximizing the application of criminal law by law enforcement officers either from kepolisin, prosecutor, until the court in an effort to overcome money politics in village head elections as well as unclear rules related to the actions of money politics and the lack of public participation, especially the villagers in collaboration with law enforcement officials to bribe the bribery of village heads.

Keywords: *Prevention of criminal acts of bribery, election of village, study money politics.*